




NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA
PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK
DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor : NK – 8/WPB.13/2022
Nomor : 900/06/NOTKES/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (30-03-2022), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEDI SOPANDI**, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.59 Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **MARWAN HAMAMI**, Bupati Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya BAB V dan BAB VI yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. 

- b. bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Sukabumi tidak lepas dari kontekstualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik secara nasional, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya.
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjadikan Nota Kesepakatan ini sebagai kerangka dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah supaya terjadi kesepakatan antar PARA PIHAK secara bersama-sama memanfaatkan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dan pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk Pemanfaatan Bersama antar PARA PIHAK atas Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah Kabupaten Sukabumi

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pertukaran Data dan Informasi Keuangan Publik di Kabupaten Sukabumi; dan
- b. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati pelaksanaan pertukaran data dan informasi keuangan publik di Kabupaten Sukabumi dalam rangka pemanfaatan untuk kepentingan bersama, yang dilakukan terhadap paling kurang data dan informasi sebagai berikut:
 - a. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi dan data Pendapatan pajak pusat yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi ;
 - b. Indikator perkembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - c. Perkembangan Jumlah dan Jenis Investasi Daerah;
 - d. Data dan Informasi Calon Debitur Potensial dan/atau Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) seperti Kredit Ultra Mikro (UMi);
 - e. Data dan Informasi Desa dan Keuangan Desa;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengelolaan DAK (fisik & non fisik);
 - g. Realisasi triwulan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
 - h. Laporan berkala realisasi APBN dan APBD;
 - i. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi;
 - j. Laporan Konsolidasi LKPP dan LKPD untuk penyusunan *Government Finance Statistics* (GFS);
 - k. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - l. Laporan hasil kajian fiskal regional yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - m. Laporan perkembangan perekonomian dan keuangan Daerah; dan
 - n. Ketentuan Perundang-undangan terkait pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan keuangan publik, melalui kegiatan seminar, *workshop*, sosialisasi, penyelenggaraan pendampingan (*Technical and Managerial Assistance*) oleh dan/atau untuk PARA PIHAK sesuai perkembangan kebutuhan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini ✓

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan salah satu atau masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini; atau
 - b. salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Cq. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

alamat : Jl. Diponegoro No. 59 Bandung

telepon : (022) 7207046/ Faks (022) 7207048

e-mail : psapd.kanwiljabar@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

Bupati Sukabumi c.q Kepala Bagian Kerjasama

alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu – Sukabumi

telepon : (+62 266) 433611

faksimile : (+62 266) 435006

e-mail : tkksd@sukabumikab.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, Profesional, dan Kode Etik Institusional masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dokumen asli selanjutnya diserahkan kepada **PARA PIHAK**, dan 1 (satu) dokumen asli lainnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

PIHAK KEDUA, 



MARWAN HAMAMI 

PIHAK KESATU, 



DEDI SOPANDI

LAMPIRAN
NOTA KESepakatan ANTARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : NK-8/WPB.13/2022
NOMOR : 900/06/NOTKES/III/2022
TANGGAL : 30 MARET 2022
TENTANG SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN
INFORMASI SERTA PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK
DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

RENCANA KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Pihak Kesatu:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
DEDI SOPANDI

Pihak Kedua:
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
MARWAN HAMAMI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER R DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026				PIHAK I	PIHAK II
1.	Pelatihan penggunaan Aplikasi SIKP	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan Pelatihan.	Karwil DUPB Prov./Jabar	Pura Pihak	April minggu ke tiga	√	√	√	√	√		Laporan kegiatan sebagai data dukung Laporan Pembinaan dan	Operator Pemda dapat mengoperasikan aplikasi SIKP, melakukan input	Memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dalam pengumpulan data	Mengusung pegawai yang berkompeten untuk mengikuti pelatihan yang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
		a. Menyampaikan undangan b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan										Monitoring Kredit Program Semester I	data calon debitur KUR dan melakukan monitoring penyusunan KUR di Kab Sukabumi	pelaku UMKM calon debitur potensial KUR	di selenggarakan oleh PIHAK KESATU
2.	Penastisahan data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah calon debitur KUR potensial	a. Melakukan pendataan calon debitur KUR potensial, b. Verifikasi kelengkapan data calon debitur c. Melakukan proses peng-input-an data pada aplikasi SIKP d. Memonitor penyaluran KUR kepada calon debitur KUR	Pemda Kab Sukabumi	Para Pihak	Sepanjang waktu (mingguan/bulanan)	√	√	√	√	√		Benyakanya input data calon debitur KUR	Penyaluran KUR kepada calon debitur KUR potensial pend. yang diinput dalam aplikasi SIKP untuk pengembangan usaha calon debitur	Melakukan monitoring dan evaluasi atas input data calon debitur KUR potensial oleh PIHAK KEDUA.	Melakukan proses input data calon debitur KUR potensial ke aplikasi SIKP
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP dan penyaluran KUR di wilayah Kabupaten Sukabumi	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan money b. Menyajikan bahan materi money c. Menyampaikan undangan/monev rima undangan Rakor kegiatan Tim Money pelaksanaan SIKP	Kantor DJPb Prov. Jabar dan atau Pemda	Para Pihak	Bulan Juni pada Semester I dan/atau bulan November pada Semester II	√	√	√	√	√		Laporan Kegiatan Money KUR	Keberhasilan pelaksanaan KUR dengan peningkatan jumlah UMKM penerima KUR di Kab. Sukabumi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KUR.	Mengadakan rapat koordinasi tim money KUR di Kab Sukabumi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER R DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
4.	Melakukan sosialisasi/ PGD pelaksanaan program kebijakan Kredit Usaha Rakyat	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan mencv b. Menyampaikan undangan/ mene- tama undangan Raker kegiatan Tim Monev pelaksanaan SIKP c. Menyajikan bahan materi sosialisasi/PGD	Kanwil DUPb Prov. Jawa Barat	Pihak Kesatu	Bulan Juni pada Semester I dan/ atau bulan November pada Semester II	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/ PGD Kebijakan program KUR	Seluruh Pemda di Jawa Barat memahami kebijakan program penyusunan KUR untuk mendukung UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional	Memberikan sosialisasi/PGD kepada Pemda tentang kebijakan program penyusunan KUR	Hadir dalam kegiatan sosialisasi/ PGD yang diselenggarakan oleh Pihak Kesatu	
5.	Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan b. Menyampaikan undangan dan/ menerima undangan kegiatan rekonsiliasi c. Melakukan kegiatan rekonsiliasi dengan periode terkait (Periode Kabupaten Bandung) d. Menyusun laporan kegiatan	Kanwil DUPb Prov. Jawa Barat	Pihak Kesatu	Januari dan Juli	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Semester I dan II	Ketepatan dan keakuratan data outstanding pinjaman Pemda/ BUMD tersebut dengan akurat	Melakukan analisis data dan rekonsiliasi atas data tersebut setelah berkoordinasi dengan para pihak terkait	Mengumpulkan sumber data dan melakukan koordinasi rekonsiliasi untuk menghasilkan perbandingan data yang akurat	
6.	Pengumpulan Informasi/ Pen- ejntan Data Pajak Regional/ Peny- usunan KPR	a. Melakukan koordinasi dengan pendan dan pihak terkait b. Membuat surat tugas c. Melakukan analisis data d. Mengompilasi data	Pemda Terpilih	Pihak Kesatu	Januari	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan KPR Tahunan	Mewujudkan akurasi data atas analisis data-data KPR	Melakukan pengumpulan dan analisis data dari para pihak terkait		

✓

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
7.	Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Menyajikan bahan materi b. Menyusun konsep renana dan jadwal pelaksanaan kegiatan c. Pelaksanaan kegiatan d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan	Karwil DJPb Prov. Jawa Barat	Pihak Kesatu	Februari	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah semester I	Pemda dan pihak terkait dapat memahami dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pembinaan dan bimtek kepada para pihak yang bersangkutan terhadap pengelolaan anggaran daerah	Hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan dan bimtek yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU	
8.	Rakor/Seminar/Diseminasi KPR Tahunan 2021	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan b. Menyampaikan undangan c. Menyajikan bahan dan materi diseminasi KPR d. Pembahasan materi dan diskusi e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan	Karwil DJPb Prov. Jawa Barat	Pihak Kesatu	Maret	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan PGD Bersama Pemda Triwulan I	Seluruh Pemda di Jawa Barat memahami materi tentang KPR	Melakukan koordinasi/ seminar kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap materi KPR	Memperhatikan setiap materi pembahasan dan melakukan diskusi Bersama PIHAK KESATU	
9.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan b. Menyajikan bahan c. Membuat Surat Tugas d. Melakukan perjalanan dinas ke Pemda yang dituju e. Melakukan pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan	Pemda kab Sumedang	Pihak Kesatu	Juni	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Pembinaan Bimbingan Teknis	Meningkatkan pemahaman dan memperbarui informasi Pemda terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dicapai pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan taat terhadap undang-undang	Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada PIHAK KEDUA, serta Menyusun laporan Pembinaan dan Bimbingan Teknis	Hadir dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
10.	Monitoring atas dana transfer dan dana desa semester I	a. Menyusun KAK/RAB dan bahan/kerjasama kerja money b. Membuat Surat Tugas money ke Pemda terpilih c. Melaksanakan kegiatan monitoring d. Menyusun laporan kegiatan	Pemda Kab Sukabumi	Pihak Kesatu	Maret dan Oktober	✓	✓	✓	✓	✓		Laporan Pemantauan DAF Pihak dan Dana Desa Semester II	Kelengkapan pelaksanaan penyuluhan dana transfer dan dana desa kepada pemda penerima	Melakukan monitoring terhadap kinerja penyuluhan dana TKDD	Melakukan pengabdian tim money dana transfer dan dana desa di instansi masing-masing
11.	Rapat Koordinasi kerja sama akses keuangan daerah/TPAKD	a. Menghadiri undangan Rakor TPAKD b. Menyampaikan bahan materi rapat TPAKD c. Menyusun laporan kegiatan	Pemda atau OJK	Pihak Kesatu	Maret dan Juli	✓	✓	✓	✓	✓		Laporan Kegiatan Rakor TPAK	Meningkatnya akses keuangan masyarakat di daerah, sehingga masyarakat mudah memperoleh akses pembiayaan dan pemodalannya	Melaksanakan rapat koordinasi dan kerjasama akses keuangan daerah bersama PIHAK KEDUA	Ikut serta dalam rapat koordinasi dan kerjasama akses keuangan daerah bersama PIHAK KESATU
12.	FGD/Steering Informasi/Forum terkait Pengelolaan Keuangan BLUD	a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan b. Menyampaikan undangan kegiatan FGD kepada pihak terkait c. Melaksanakan pembahasan materi dan diskusi tentang pengelolaan keuangan BLUD d. Menyusun Laporan FGD	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	Pihak Kesatu	Agustus	✓	✓	✓	✓	✓		Laporan FGD Bersama Pemda Triwulan III	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan BLUD	Memberikan pembahasan serta diskusi bersama PIHAK KEDUA terkait pengelolaan keuangan BLUD	Menyimak pembahasan serta ikut berdiskusi bersama PIHAK KESATU terkait pengelolaan keuangan BLUD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER R DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
13.	Sosialisasi, FGD dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah/ DAK Fisik dan Dana Desa	bersama Pemda Triwulan III a. Menyusun KAK dan RAB kegiatan b. Menyampaikan undangan kegiatan FGD kepada pihak terkait c. Menyiapkan bahan materi FGD d. Melaksanakan pembahasan materi dan diskusi tentang DAK Fisik dan Dana Desa e. Menyusun Laporan FGD bersama Pemda Triwulan III	Karwil Djrb Prov. Jawa Barat	Pihak Kesatu	Februari dan Oktober	✓	✓	✓	✓	✓		Laporan FGD Bersama Pemda Triwulan IV	Meningkatnya pemahaman pengelolaan keuangan terkait DAK Fisik dan Dana Desa yang optimal	Memberikan pembekalan serta berdiskusi bersama PIHAK KEDUA terkait pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa	Menyimak pembahasan serta ikut berdiskusi bersama PIHAK KESATU terkait pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa
14.	Pembinaan/Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD	a. Menyiapkan bahan b. Menyusun konsep rencana dan jadwal pelaksanaan c. Melakukan pembinaan dan Bimbingan Teknis dengan cara <i>capacity building</i> atau konsultasi d. Menyusun Laporan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah Semester II	BLUD/ Pemda	Pihak Kesatu	November	✓	✓	✓	✓	✓		Laporan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah Semester II	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan BLUD	Memberikan pembinaan/asistensi kepada PIHAK KEDUA, serta Menyusun Laporan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah Semester II	Hadir dalam kegiatan pembinaan/asistensi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER R DANA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
15.	Penyusunan Laporan Government Financials Statistics (GFS) Preliminary, Unaudited dan Audited	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD menyampaikan Data Laporan Keuangan berupa : Lap Realisasi Anggaran ; Neraca; Lap Operasional; Lap Perubahan Ekuitas; Lap Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Preliminary (31 Januari) Unaudited (Mei) Audited (Juli)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW); Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Government Financials Statistics (GFS)	Laporan GFS dipergunakan sebagai bahan untuk penentuan kebijakan Pemerintah	Kanwil DJP Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Government Financials Statistics (GFS) berdasarkan dari hasil Laporan Konsolidasian antara LKPP dan Lap Keuangan Pemda.	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD Menyajikan Data Laporan Keuangan berupa : Lap Realisasi Anggaran ; Neraca; Lap Operasional; Lap Perubahan Ekuitas; Lap Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
16.	Penyusunan Laporan Government Financials Statistics (GFS) Triwulan I dan III	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD menyampaikan Data Laporan Keuangan berupa : Lap Realisasi Anggaran (LRA); Lap Operasional	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Triwulan I Triwulan III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Government Financials Statistics (GFS)	Laporan GFS dipergunakan sebagai bahan untuk penentuan kebijakan Pemerintah	Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Government Financials Statistics (GFS) berdasarkan dari hasil Laporan Konsolidasian antara LKPP dan Lap Keuangan Pemda.	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD Menyajikan Data Laporan Keuangan berupa : Lap Realisasi Anggaran (LRA) ; Lap Operasional (LO)
17.	Penyusunan Laporan Government Financials Statistics (GFS) Semester I	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD menyampaikan Data Laporan Keuangan berupa : Lap Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Lap Operasional (LO).	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Semester I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Government Financials Statistics (GFS)	Laporan GFS dipergunakan sebagai bahan untuk penentuan kebijakan Pemerintah	Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Government Financials Statistics (GFS) berdasarkan dari hasil Laporan Konsolidasian antara LKPP dan Lap Keuangan Pemda.	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD Menyajikan Data Laporan Keuangan berupa : Lap Realisasi Anggaran (LRA) ; Neraca; Lap Operasional (LO)
18.	Koordinasi dan Sharing Sessions Penyusunan Laporan Keuangan	Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Menyusun Rencana Kegiatan Koordinasi dan	BPKAD/BK D Penda Kab Sukabumi	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Menyusun Rencana Kerja yang disusun Kanwil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kerja Koordinasi/Shar ing Sessions dan	Bidang Akuntansi pada BPKAD/BKD Menyajikan data- data yang diperlukan oleh Tim dari Kanwil Dipjen	Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sharing Sessions/ Laporan Hasil Pembinaan Akuntansi Pelaporan Keuangan	Meningkatkan Pengetahuan/Pema hasan Pengelola n Keuangan Pemda terhadap Sistem Akuntansi sehingga

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DATA	JADWAL	TAHUN						OUTPUT	OUTCOME	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I			PIHAK II	
		Sharing Sessions dan menyempatkan Pembertahuan rencana kunjungan kepada Pemda			Dijeri Perbedah aruan Prov Jawa Barat							menyampaikan pembertahuan ke Pemda yang akan dikunjungi	Perbedakbaraan Prov Jawa Barat		dapat menyusun Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
19.	Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Bidang PAPK Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat Menyusun Rencana Kegiatan Bimtek SAPD dan Menyampaikan Undangan Kepada Pemda	Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat	Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat	Semester I Semester II	√	√	√	√	√		Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis	Meningkatkan Pengetahuan/Pemahaman Pengelola Keuangan Pemda terhadap Sistem Akuntansi sehingga dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat Menyusun Rencana Kegiatan Bimtek SAPD dan Menyampaikan Undangan Kepada Pemda	Hadir dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU
20.	Focus Group Discussions (FGD)	Bidang PAPK Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kegiatan FGD dan Menyampaikan Undangan Kepada Pemda	Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat	Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat	Menyusai kan Rencana Kerja yang disusun Karwil Dijen Perbedah aruan Prov Jawa Barat	√	√	√	√	√		Laporan Kegiatan Focus Group Discussions (FGD)	Meningkatkan Pengetahuan/Pemahaman Pengelola Keuangan Pemda terhadap Sistem Akuntansi sehingga dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bidang PAPK Karwil DJPB Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kegiatan FGD dan Menyampaikan Undangan Kepada Pemda	Hadir dalam kegiatan Focus Group Discussions (FGD) yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU

DEDEDI SOPANDI